

BAB V

KESIMPULAN

Bacakak kampuang yang terjadi antara masyarakat Kampung Surau dan Parit Rantang yang mengakibatkan 10 rumah masyarakat Kampung Surau dibakar. Pemantik konflik ini adalah permasalahan tapal batas, yaitu pemasangan gapura oleh pemuda Kampung Surau. Konflik *bacakak kampuang* ini menyimpan permasalahan panjang didalamnya. Permasalahan pekerjaan menjadi faktor utama terjadinya *bacakak kampuang*. Keserakahan dan ingin menguasai semuanya menjadi faktor dalam konflik ini. Setiap kampung, yaitu Kampung Surau dan Parit Rantang ingin menguasai pekerjaan yang ada di PT Bina Pratama Sakato Jaya.

Konflik *bacakak kampuang* ini diaktori oleh preman Kampung Surau. Preman-preman inilah yang kemudian memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan pertikaian antara kedua kampung. Hal ini didasari karena, baik Kampung Surau maupun Parit Rantang sama-sama ingin menguasai wilayah kerja yang ada di PT Bina Pratama Sakato Jaya. Keserakahan dari kedua kampung yang kemudian memicu konflik ini terjadi.

Pada awalnya masyarakat Kampung Surau yang mendominasi pekerjaan yang ada di PT Bina Pratama Sakato Jaya, yaitu pekerjaan Anak *Bongka* dan angkutan muat buah sawit. Kedua pekerjaan ini dikuasai oleh masyarakat Kampung Surau. Masyarakat Parit Rantang hanya mendapatkan pembagian kerja yang sedikit. Seiring berjalannya waktu, jumlah pekerja dari Parit Rantang semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan lahan pekerjaan juga meningkat. Akan tetapi, kuota untuk pekerja Parit Rantang masih tetap sama dan tidak mencukupi, sehingga

mulailah timbul kekecewaan dan ketidakpuasan dari masyarakat Parit Rantang karena permasalahan pekerjaan ini.

Adanya pemantik konflik karena permasalahan tapal batas wilayah, membuat masyarakat Parit Rantang mendapatkan kesempatan dan peluang untuk mengubah dan menyudahi dominasi Kampung Surau di PT BPSJ. Permasalahan ketidakpuasan, kekecewaan dan ketidakadilan yang terpendam lama pada masyarakat Parit Rantang kepada masyarakat Kampung Surau karena mayoritas menguasai lahan kerja di PT BPSJ. Pelampiasan rasa ketidakpuasan masyarakat Parit Rantang didapatkan ketika munculnya peluang yaitu konflik tapal batas. Permasalahan tapal batas menjadi batu loncatan bagi masyarakat Parit Rantang untuk melampiaskan rasa kekecewaan dan ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setelah terjadinya konflik tapal batas, kemudian permasalahan menjalar menjadi permasalahan jatah kerja Anak *Bongka* dan permasalahan jatah kerja pengelolaan angkutan muat buah sawit di perkebunan PT Bina Pratama Sakato Jaya.

Permasalahan tapal batas sudah menjadi permasalahan yang sangat rawan di Sumatra Barat, terutama Kabupaten Dharmasraya. Kabupaten Dharmasraya termasuk ke dalam peta konflik yang ada di wilayah Sumatra Barat. Hal ini karena wilayah ini memiliki perkebunan sawit yang luas dan beragamnya etnik yang mendiam wilayah ini, sehingga mudahnya muncul konflik horizontal antar masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di masing-masing wilayah yang ada di Dharmasraya. Proses pembangunan harus selalu mengutamakan kearifian lokal dalam setiap mengambil langkah kebijakan yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah harus melibatkan seluruh golongan masyarakat.

Permasalahan tapal batas cuma menjadi pemantik terjadinya konflik *bacakak kampuang*. Permasalahan administrasi wilayah merupakan tugas pemerintah daerah. Ketika lambatnya penanganan dan penyelesaian tapal batas di setiap daerah, maka membuat celah untuk timbulnya permasalahan dalam masyarakat mengenai tapal batas ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan penyelesaian tapal batas sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah.

Apabila merunut pada teori Dean G Pruitt yang menjelaskan dan menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang dalam konflik *bacakak kampuang* ini, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat Parit Rintang yang menjadi pemenangnya. Hal ini karena pihak pemenang yang dijelaskan oleh Dean adalah pihak yang mendapatkan pengabulan semua permintaan, sementara pihak yang lain hanya mendapatkan sedikit atau tidak mendapatkan apapun. Pihak Parit Rintang mendapatkan pengabulan dari tuntutan yang mereka berikan yaitu tuntutan mengenai tapal batas wilayah, tuntutan tentang pekerjaan Anak *Bongka*, dan tuntutan tentang pengelolaan angkutan muat buah sawit. Semua tuntutan tersebut berhasil diterima walaupun harus melalui proses perundingan. Sedangkan pada pihak Kampung Surau, mereka menjadi pihak yang dituntut, maka pihak Kampung Surau harus mengalah untuk mencari jalan tengah dari tuntutan-tuntutan yang diterimanya dari masyarakat Parit Rintang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pihak Parit Rintang yang keluar sebagai pemenang dalam konflik ini.

Apabila merunut pada teori Alo Liliweri mengenai pihak yang keluar sebagai pemenang dalam konflik ini maka kedua pihak yaitu pihak Parit Rintang dan pihak Kampung Surau keluar sebagai pemenangnya. Kedua pihak menang karena kedua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir

memuaskan dua pihak. Jika dua pihak menerima keputusan dengan lapang dada, maka akan mencegah timbulnya konflik yang bersumber dari masalah yang sama. Pihak Parit Rantang menerima sedikit dari tuntutananya dengan hasil akhir yang memuaskan kedua belah pihak karena diambil jalan tengahnya dengan unsur keadilan tanpa ada pihak yang lebih diuntungkan. Pihak Kampung Surau menerima dengan lapang dada hasil keputusan kedua belah pihak untuk mencegah timbulnya konflik yang baru.

